Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 84−96
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Manajerial pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

Amkhana Desyafitri[1,*], Nining Wahyuningsih[1]

[1] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

partisipasi anggaran; akuntansi pertanggungjawaban; *job relevant information*; kinerja manajerial

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan *job relevant information* terhadap kinerja manajerial pada lembaga keuangan daerah Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban dan informasi terkait pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara simultan, partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan *job relevant information* berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

KEYWORDS

budget participation; *accountability accounting*; *job relevant information*; *managerial performance*

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of budget participation, responsibility accounting, and job relevant information on managerial performance in regional finance agency Indramayu. This study uses quantitative methods with data collection techniques through observation, documentation and questionnaires. The analytical technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially budgetary participation has no effect on managerial performance, while responsibility accounting and job relevant information affect managerial performance. Simultaneously budgetary participation, responsibility accounting and job relevant information affect managerial performance at the Regional Finance Agency of Indramayu Regency.

Received : *30 March 2023*
Revised : *1 May 2023*
Accepted : *2 June 2023*

*Correspondence to:
apriyanapattien@gmail.com

PENDAHULUAN

Organisasi, baik sektor privat maupun publik (pemerintah daerah), akan berusaha meningkatkan capaian kinerja dengan cara memaksimalkan sasaran dan tujuannya. Salah satu faktor utama berhasil atau tidaknya suatu organisasi dapat dilihat dari kinerja manajerial. Oleh karena itu, dibutuhkan kualitas dan kredibilitas sumber daya manusia (SDM) dalam memimpin, mengelola dan merencanakan strategi yang akan dilakukan organisasi.

Kinerja merupakan faktor penting untuk mengukur efektifitas dan efisiensi organisasi (Johan & Syofyan, 2019). Kinerja manajerial yang baik dalam suatu organisasi dapat dilihat dari segi kecakapan manajer atau pimpinan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Capaian kinerja organisasi sangat didukung oleh kinerja manajerial yang memadai (Sianipar, Siregar, Hery, & Palungan, 2020).

Partisipasi anggaran berperan untuk meningkatkan kinerja manajerial karena suatu kegiatan membutuhkan penyusunan anggaran yang melibatkan beberapa individu yang berpengaruh terhadap anggaran yang dibuat dalam suatu organisasi. Dengan menyusun anggaran secara partisipasi dapat menguntungkan organisasi karena hal ini memiliki peranan penting dalam proses penilaian kinerja manajerial (Rahmawati, Budiwibowo, & Murwani, 2017). Sebagai seperangkat sistem yang disusun untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya dan pendapatan yang dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban individu atau pegawai yang bertujuan agar dengan mudah mendeteksi individu-individu yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap penyimpangan biaya dan penghasilan yang dialokasikan, akuntansi pertanggungjawaban memiliki peranan penting untuk mendukung kinerja manajerial agar berjalan dengan baik (Mulyadi, 2001) Akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dapat dijadikan pedoman pemisahan fungsi atau tugas untuk masing-masing individu yang disesuaikan dengan jabatan serta dapat memudahkan organisasi dalam mengendalikan setiap kegiatan operasionalnya (Juwita, 2020).

Dalam organisasi perlu adanya informasi yang selaras dengan pekerjaan yang akan dilakukan untuk menunjang efektifitas kegiatan yang akan dilakukan para pegawai. Menurut Sumadiyah (2004), *job relevant information* berperan penting dalam kinerja manajerial dikarenakan Informasi yang sesuai dengan pekerjaan dapat mendukung pimpinan untuk membenahi penetapan keputusan melalui usaha yang diberikan secara maksimal yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal organisasi ataupun perusahaan.

Dilansir dari idxchannel.com, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Indramayu pada tahun 2021 daya serapnya dinilai masih jauh dari target. Pada akhir bulan Juli 2021 realisasinya baru menyentuh angka 32,90%. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat menghadiri rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten Indramayu meminta kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk dapat menaikan realisasi belanja pada APBD sampai pada angka 50%. Kemendagri juga menegaskan agar budaya gotong royong yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diperkuat. Pada kesempatan yang sama Kemendagri juga berharap dan meminta bupati indramayu agar dapat meningkatkan kerjasama dalam membentuk koordinasi terkait konsolidasi keuangan bersama perangkat internal pemerintahan seperti

Sekretaris Daerah (SEKDA), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).

Ditinjau dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat faktor yang memengaruhi capaian kinerja manajerial dalam organisasi, antara lain partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan *job relevant information*. Partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran dapat mendukung dalam pencapaian kinerja manajerial dalam suatu organisasi. Dikarenakan proses penyusunan anggaran dikerjakan oleh masing-masing bidang atau bagian yang didasarkan pada target kegiatan yang akan direalisasikan atau didasarkan pada realisasi program kegiatan pada tahun sebelumnya (Rahmawati, Budiwibowo, & Murwani, 2017). Akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi diimplementasikan sebagai sarana untuk mengendalikan manajemen terhadap penilaian kinerja, yaitu dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang telah dilakukan, sehingga manajer pada masing-masing pusat pertanggungjawaban dapat mempertanggungjawabkan apa saja yang bisa dikendalikan olehnya. Jika penerapan akuntansi pertanggungjawaban dilaksanakan secara baik maka dapat meningkatkan kinerja manajerial (Mutmainah & Riharjo, 2020).

Persoalan anggaran merupakan permasalahan yang sering terjadi. Bisa dilihat dari aspek perencanaan keuangan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran belanja lembaga/satuan kerja yang masih kurang wajar, efisien, dan selaras dengan pemasukan/pengeluaran yang telah direncanakan, hal ini berdampak pada tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur untuk menilai prestasi kinerja manajerial atas laporan pertanggungjawaban atas perencanaan anggaran yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi penyusunan anggaran dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan serius untuk meningkatkan prestasi kinerja manajer selaku pengambil keputusan dalam organisasi. Perlu informasi yang baik dan relevan sesuai dengan pekerjaan pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai pada internal organisasi sehingga memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan.

Badan Keuangan Daerah atau yang disingkat BKD Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Indramayu yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada anggaran yang dialokasikan pada periode sebelumnya. Menurut persentase realisasi pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu yang mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak proporsional setiap tahunnya, yaitu belum idealnya pelaksanaan sistem dan prosedur kerja yang disediakan dalam lingkungan organisasi serta realisasi belanja yang belum memenuhi target menunjukan bahwa kinerja manajerial dalam instansi belum dapat terlaksana dengan baik dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan job relevant information terhadap kinerja manajerial pada badan keuangan daerah kabupaten Indramayu.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja adalah suatu capaian kerja yang dipandang dari segi kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai oleh sumber daya manusia dalam organisasi dalam

menjalankan tugasnya serta memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011). Di dalam sektor publik, kinerja merupakan pencapaian yang telah diperoleh oleh para pegawai dan instansi itu sendiri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pada periode berjalan atau satu periode. Kinerja pada sektor publik atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah penggambaran seberapa besar pencapaian yang telah dilaksanakan organisasi yang berisi sasaran sebagai pemetaan dari visi, misi dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengisyaratkan kegagalan atau keberhasilan kegiatan-kegiatan selaras dengan tugas, pokok dan fungsi pegawai pemerintahan (Kanji, 2018).

Kinerja manajerial merupakan perilaku seorang pimpinan organisasi dalam mewujudkan prestasinya dengan cara menyalurkan kemampuan, bakat dan upaya orang lain dibawah wewenangnya (Krismiaji & Aryani, 2019). Menurut Mardiasmo (2009), tujuan kinerja manajerial sebagai berikut.

a. Menentukan pemahaman setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dan ukuran yang sesuai dalam upaya mencapai prestasi.
b. Menetapkan capaian ide-ide atau rancangan yang telah disetujui oleh pihak terkait.
c. Mengevaluasi dan memantau (*monitoring*) kinerja dengan cara membandingkan rancangan (p*lanning*) dengan realisasi.
d. Memberikan reward dan punishment secara adil/netral atas pencapaian pelaksanaan yang sudah diukur sesuai dengan kadar ukuran prestasi yang telah ditetapkan.
e. Menetapkan komunikasi antara pimpinan dan karyawan dalam rangka untuk perbaikan pencapaian organisasi.
f. Mendukung dalam upaya memahami bagaimana pelaksanaan atau proses kegiatan yang dilakukan instansi sektor publik.
g. Memperlihatkan kenaikan atau peningkatan yang harus dilakukan organisasi atau instansi.

Pengukuran kinerja manajerial menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Mahoney dalam Johan & Syofyan (2019) yaitu sebagai berikut.

a. Perencanaan, yaitu keputusan atas hal yang ditetapkan berlandaskan fakta dan pemikiran yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Investigasi, yaitu suatu cara yang dijalankan suatu instansi untuk menyatukan informasi yang berbentuk laporan catatan dan analisis mengenai pekerjaan untuk mengukur hasil yang diperoleh.
c. Koordinasi, suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan dan memperbaiki tindakan yang akan dilakukan meliputi tukar menukar informasi bersama sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi.
d. Evaluasi, yaitu penaksiran berdasarkan saran atas kinerja yang diamati yang kemudian dilaporkan bersama orang-orang yang berada dalam suatu organisasi.
e. Supervisi, yaitu memupuk dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh bawahan, melakukan pelatihan dan memaparkan peraturan kerja yang telah ditetapkan kepada bawahan.
f. Pemilihan staf, yaitu memelihara dan menjaga pegawai tingkat bawah, menempatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan menawarkan

pekerjaan tersebut dalam unit yang lain.

g. Negosiasi, yaitu upaya untuk mendapatkan keputusan antara satu dengan yang lain dalam hal transaksi kontrak.
h. Representasi, yaitu pemberian informasi mengenai visi, misi dan kegiatan operasional organisasi dengan cara ikut serta dalam pertemuan antar tim bisnis lain serta melakukan shearing dengan organisasi-organisasi yang lainnya.

Kinerja manajerial dalam suatu organisasi dapat digunakan sebagai dasar penilaian untuk melihat seberapa jauh manajer menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengelola organisasi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu alat untuk mengukur kualitas dan kuantitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Pada sektor publik, kinerja merupakan suatu pencapaian atau prestasi yang diraih oleh para pegawai pemerintahan atau instansi sektor publik dalam menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarakat pada suatu periode tertentu (Johan & Syofyan, 2019).

Dalam suatu organisasi diperlukan kinerja orang-orang yang mampu menjalankan kegiatan-kegiatan yang tersusun secara teratur dan terstruktur guna mencapai sasaran program kerja, kualitas kinerja yang lebih baik sehingga organisasi dapat berdiri kuat. Maka dalam hal ini diperlukan prestasi dari seorang pimpinan yang memadai untuk mendukung dan memimpin aktivitas organisasi agar berjalan teratur dan maksimal. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa barisan yang teratur seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, dimana jika seorang manajer dalam memimpin bagian atau bidang secara baik maka akan menjadikan organisasi atau bidang yang dipimpinnya mencapai sasaran dan tujuannya secara maksimal.

Partisipasi adalah suatu sistem dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama oleh dua atau lebih sumber daya manusia yang memiliki pengaruh di masa yang akan datang (Mulyadi, 2016). Sementara, anggaran merupakan alat pengawasan dan perencanaan secara tertulis bagi manajemen organisasi. Partisipasi anggaran menurut Kenis dalam Li, Nan, & Mo (2010) merupakan keikutsertaan yang mencakup semua individu didalam organisasi untuk ikut berperan mempersiapkan anggaran yang nantinya dapat berpengaruh pada tujuan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban.

Partisipasi Anggaran menurut Hansen & Mowen dalam Anggadini & Qurni (2020) merupakan penyusunan anggaran yang dalam prosesnya melibatkan para manajer tingkat atas dan manajer tingkat bawah untuk ikut andil dalam penyusunan anggaran organisasi. Menurut Mahmudi (2010), partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keterlibatan pegawai dan pimpinan pada kegiatan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran secara partisipasi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi pegawai dan pimpinan dalam upaya pencapaian realisasi anggaran.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Prawironegoro & Purwanti (2009) adalah sebagai berikut.

a. Membebani manajer untuk pembuatan rencana kerja organisasi, sebagai bahan alat penilaian kinerja.
b. Digunakan untuk mendorong efisiensi koordinasi dan memperlancar komunikasi antar manajer.

c. Sebagai alat pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Dalam kegiatan penyusunan anggaran mengharuskan setiap pimpinan organisasi untuk merancang rencana kerja. Maksudnya pimpinan diharuskan mampu berpikir secara aktif terkait dengan prediksi perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi pada waktu mendatang.
d. Sebagai alat dalam penilaian kinerja maksudnya adalah kinerja yang telah dicapai manajemen harus dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel partisipasi anggaran sebagai berikut.

a. Pertukaran informasi, *controller* atau pengendali perencanaan memegang tanggung jawab untuk menerapkan anggaran yang telah disusun. Hal tersebut dapat berjalan lancar dengan pertukaran informasi yang memadai terkait sasaran operasional yang disetujui bawahan.
b. Keikutsertaan, turut andil dalam pelaksanaan penyusunan anggaran serta bekerja sama antar rekan sejawat berguna untuk mencapai sasaran perencanaan anggaran secara efektif dan efisien.
c. Kolaborasi, Penerapan anggaran dapat dikatakan berhasil tentunya memerlukan kolaborasi sesama team dengan bermacam-macam keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Salah satu bagian penting yang mendukung proses kerjasama pimpinan dan bawahan di dalam organisasi adalah partisipasi. Dengan dilakukannya partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan komunikasi yang baik antar sesama pegawai/karyawan sehingga dapat diketahui seberapa besar keikutsertaan individu dalam kegiatan penyusunan anggaran dan pelaksanaanya dalam rangka mencapai target anggaran yang telah ditentukan (Desyatama & Praptiestrini, 2021). Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya : "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Q.S. Al- Maidah/5:8). Dalam partisipasi penyusunan anggaran diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Anggaran yang dialokasikan harus disusun secara adil oleh pimpinan dan bawahan untuk kepentingan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta dapat dipertanggungjawabkan kejelasannya pada periode tertentu.

Menurut Hansen & Mowen dalam Salman & Farid (2017), akuntansi pertanggungjawaban diartikan sebagai sistem yang dapat mengukur hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi selaras dengan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan pusat pertanggungjawabannya. Menurut Henri dalam Haq & Christyaningrum (2016), *responsibility accounting* adalah suatu sistem yang melaporkan informasi dengan menggolongkan data keuangan sesuai bidang-bidang pertanggungjawaban dalam organisasi serta melaporkan kegiatan setiap bidang/bagian yang terdiri dari biaya dan pendapatan yang sudah dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban.

Menurut Robert. N. Anathony dan Roger H. Hermantions dalam Salman & Farid (2017), akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk memberikan beban

kepada pusat pertanggungjawaban sesuai dengan realisasi-realisasi biaya yang telah digunakan. Serta digunakan sebagai bahan penilaian hasil kerja pada pusat pertanggungjawaban untuk mendukung ketepatan kegiatan operasional suatu organisasi di waktu mendatang. Selain itu juga dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, para individu melaksanakan perannya secara aktif untuk mencapai target organisasi.

Menurut Carter dalam Rahmawati, Budiwibowo, & Murwani (2017), indikator untuk mengukur variabel akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan:

a. Struktur organisasi, dalam rangka menyediakan pengendalian operasional, organisasi perlu menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif dan efisien.
b. Pengendalian biaya, upaya organisasi dalam memaksimalkan sistem akuntansi pertanggungjawaban secara efektif dan efisien, yaitu dengan memplotkan komponen biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan. Penentuan tanggungjawab atas biaya, untuk mencapai tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban pengalokasian biaya ditentukan saat sudah ditetapkan siapa saja pemegang tanggung jawab atas alokasi biaya-biaya tersebut yang kemudian penerima alokasi biaya dijadikan sebagai pemegang kendali atas biaya yang telah dialokasikan.
c. Pelaporan tanggung jawab, Laporan pertanggungjawaban pada organisasi disebut juga laporan akuntabilitas.

Suatu organisasi atau perusahaan harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan kepercayaan kepada khalayak umum mengenai apa saja prestasi dan kegiatan yang telah dicapai selama periode tertentu. Firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinnya: "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*" (Q.S. Al-Mudatsir/74:38). Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam organisasi sektor publik, tentunya instansi pemerintah harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang telah dilakukan. Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai tolak ukur mengenai pencapaian pada periode sebelumnya dan menjadi bahan masukan pada periode berikutnya (Sianipar, Siregar, Hery, & Palungan, 2020).

Job relevant information menurut Kren (1992) merupakan informasi yang dapat meringankan sekaligus memudahkan pimpinan dalam menentukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas guna tercapainya hasil yang semakin baik. Penerapan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara maksimal dapat membantu pegawai dalam pemilihan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan sehingga keputusan yang diambil sesuai target organisasi. Yusfaningrum & Ghozali dalam (Panghegar & Rosyati, 2009).

Menurut Safitri dalam Panghegar & Rosyati (2009) setiap informasi yang bersumber dari pegawai kepada pimpinan bagian/bidang memiliki dua manfaat yaitu:

a. Kualitas informasi yang berhubungan dengan tugas diberikan secara akurat dikarenakan bersumber dari tiap departemen/bidang yang menjalankan kegiatan operasional organisasi.
b. Tiap departemen/bidang memberikan pemahaman yang jelas kepada manajer atau pimpinan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara wajar

dan selaras dengan tujuan organisasi.

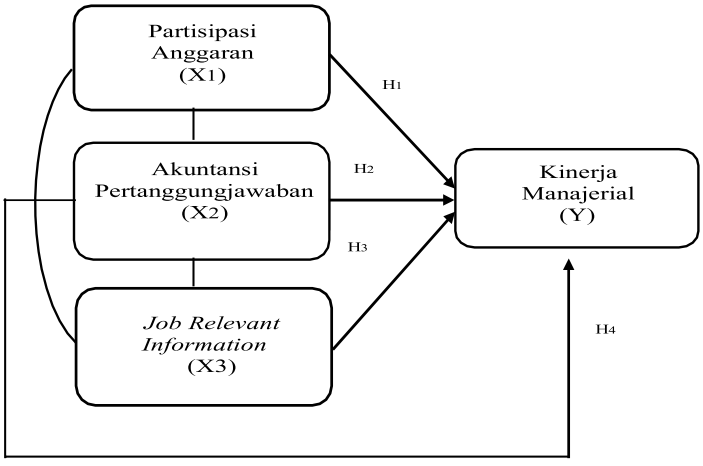
Indikator untuk mengukur Job relevant information adalah sebagai berikut.

a. Informasi bersifat jelas, informasi yang tersedia harus mudah dimengerti oleh pembaca, agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan secara jelas sehingga bermanfaat bagi para pengambil keputusan.
b. Informasi bersifat relevan, semua informasi yang disajikan harus sesuai dan berkaitan dengan apa yang diperlukan terkait tujuan dalam organisasi
c. Informasi yang disajikan memadai, semua informasi yang ada harus disajikan secara lengkap dan mencukupi sesuai yang dibutuhkan pemakai (pengguna) informasi.
d. Informasi bersifat strategik, ketersediaan informasi dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan jangka panjang dan harus mendukung dalam upaya mencapai tujuan.
e. Mencari informasi yang tepat, setiap Informasi diharuskan dapat diperoleh pada waktu yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, mengenai tugas yang dibebankan organisasi kepada manajer dan pegawai. Jika terjadi miss komunikasi dalam lingkungan kerja, maka akan menghambat pelaksanaan tugas karena kurangnya informasi yang beredar. Dengan penerapan Job relevant information yang baik maka pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Informasi yang sesuai dengan pekerjaan para pegawai sangat penting untuk mendukung terlaksananya program yang telah disusun.

Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, mengenai tugas yang dibebankan organisasi kepada manajer dan pegawai. Jika terjadi *miss* komunikasi dalam lingkungan kerja, maka akan menghambat pelaksanaan tugas karena kurangnya informasi yang beredar.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_1 : terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

H_2 : terdapat pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja

manajerial.

H_3 : terdapat pengaruh *job relevant information* terhadap kinerja manajerial.

H_4 : terdapat pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan *job relevant information* terhadap kinerja manajerial.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu dan sudah berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu sebanyak 84 pegawai. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik dalam pengambilan sampel dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel dari populasi dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat ukur data (Haryono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 1.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,746	0,557	0,528	3,858

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil pada tabel 2, diperoleh besarnya nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai *R Square* sebesar 0,557. Hal ini berarti bahwa variabel independent partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan job relevant information memberikan kontribusi sebesar 55,7% terhadap variabel dependen kinerja manajerial sedangkan sisanya (44,3%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Hipotesis

Tabel 2.
Hasil Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	T Statistics	P Values	Kesimpulan
Partisipasi Anggaran	−0,030	−0,140	0,890	Tidak signifikan
Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahaan	0,471	2,081	0,043	Signifikan
Job Relevant Information	0,848	4,156	0,000	Signfikan

Sumber: data diolah (2022)

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t*hitung* lebih kecil dari t*tabel* untuk variabel partisipasi anggaran yaitu -0,140 < 2,014 dan nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* yaitu 0,890 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel partisipasi anggaran (X1) terhadap variabel kinerja manajerial (Y) maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.

Partisipasi anggaran merupakan keikutsertaan manajer tingkat atas (*top manager*) dan tingkat bawah (*low manager*) dalam melakukan penyusunan anggaran. Ditolaknya hipotesis ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu pertukaran informasi, komunikasi dan keikutsertaan. Dalam proses penyusunan anggaran, tidak semua manajer ikut serta atau berpartisipasi dalam menentukan anggaran perkegiatan didalam suatu pusat pertanggungjawaban. Menurut Nengsy (2019), sebab tidak berpengaruhnya partisipasi dalam penyusunan anggaraan terhadap kinerja manajerial atau pimpinan yaitu karena kurangnya pendekatan yang dilakukan pimpinan terhadap orang-orang dibawah pusat pertanggungjawabannya yang dapat menurunkan kinerja anggota didalam organisasi.

Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t*hitung* lebih besar dari t*tabel* untuk variabel akuntansi pertanggungjawaban yaitu 2,081 > 2,014 dan nilai signifikansi signifikansi lebih kecil dari *alpha* yaitu 0,043 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel akuntansi pertanggungjawaban (X2) terhadap variabel kinerja manajerial (Y) maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban atau *Responsibility Accounting* sudah dikatakan baik pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Akuntansi pertanggungjawaban mampu membantu manajer dalam melakukan kontrol dan koordinasi pada setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen & Mowen dalam (Salman & Farid, 2017) diartikan sebagai sistem yang dapat mengukur hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi selaras dengan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu digunakan kontro dalam manajemen yaitu dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang telah dilakukan pada setiap bidang/bagian.

Pengaruh *Job Relevant Information* terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t*hitung* lebih besar dari t*tabel* untuk variabel *Job Relevant Information* yaitu 4,156 > 2,014 dan nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* yaitu 0,043 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel *job relevant information* (X3) terhadap variabel kinerja manajerial (Y) maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.

Job relevant information atau informasi yang sesuai dengan pekerjaan merupakan suatu informasi yang mendukung pekerjaan manajemen sekaligus pegawai dalam hal mengambil keputusan. *Job relevant information* menurut (Kren, 1992) merupakan informasi yang dapat meringankan sekaligus

memudahkan pimpinan dalam menentukan kegiatan yang berhubungan dengan tugas guna tercapainya hasil yang semakin baik. Penerapan *Job relevant information* pada Badan Keuangan Daerah Indramayu digunakan untuk memperoleh pemahaman yang maksimal serta dapat menghasilkan tindakan yang sesuai dengan informasi yang selaras dengan pekerjaan serta mendukung pekerjaan para pegawai dan manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam organisasi.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 3.
Hasil Uji F

F	P Values
18,863	0,000

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji F (Simultan) tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut. hipotesis pada penelitian ini mengatakan bahwa H_4: Terdapat pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan *job relevant information* terhadap kinerja manajerial. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t*hitung* > t*tabel* yaitu sebesar 18,863 > 2,81 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan *job relevant information* secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja manajerial maka dapat disimpulkan bahwa H_4 Diterima.

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan *Job Relevant Information* secara bersama-sama terhadap Kinerja Manajerial

Penerapan partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan *job relevant information* pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sudah dikatakan baik. Partisipasi anggaran dilakukan oleh manajer tingkat atas, tingkat bawah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dari anggaran tersebut kemudian disusun laporan akuntansi pertanggungjawaban yang berisi target dan realisasi anggaran per kegiatan pada setiap bidang. Sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan mampu membantu manajer dalam melakukan kontrol dan koordinasi berdasarkan informasi yang sesuai dengan pekerjaan para pegawai pada setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

KESIMPULAN

Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Job relevant information berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. karena dengan diterapkannya job relevant information yang baik pada suatu organisasi dapat mendukung kegiatan. Partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan

job relevant information secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

Anggadini, S. D., & Qurni, G. Z. (2020). Partisipasi anggaran berdampak pada kinerja manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi, 12(1),* 88-94. DOI 10.34010/jra.v12i1.2698

Desyatama, I., & Praptiestrini. (2021). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial badan keuangan daerah kabupaten Karanganyar. *Surakarta Accounting Review (SAREV), 3(1),* 18-30.

Johan, H. H., & Syofyan, E. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan latar belakang pendidikan terhadap kinerja manajerial di satuan kerja Kementerian Perindustrian Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(4),* 1773-1793.

Juwita, R. (2020). Implementasi akuntansi pertanggungjawaban dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial di satuan kerja perangkat daerah provinsi Jawa Barat. *Competitive, 15(1).*

Kanji, L. (2018). Pengaruh akuntabilitas publik dan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD kota Makasar. *Bongaya Journal for Research in Accounting, 1(1),* 58- 64.

Kren, L. (1992). Budgetary participation and managerial performance: The impact of information environment volatility. *The accounting review, 67(3),* 511-526.

Krismiaji, & Aryani, Y. (2019). *Akuntansi Manajemen.* UPP STIM YKPN.

Li, W., Nan, X., & Mo, Z. (2010). Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance. *International Conference On Management And Service Science.* Mass.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah.* Erlangga.

Mangkunegara, A. A. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.* Remaja Rosda Karya.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Andi.

Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen Edisi 3.* Salemba Empat.

Mutmainah, & Riharjo, B. I. (2020). Pengaruh penganggaran partisipatif dan sistem akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial (studi pada Institut Sepuluh November Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(9).*

Nengsy, H. (2019). Pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan job relevant information terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *8*(1), 1-18.

Panghegar, D., & Rosyati, R. (2009). The impact budgetery participation toward

managerials performace and job satosfaction: Job relevant information (JRI) and budget goal commitment as intervening variabel. *Jurnal Bisnis Ekonomi, 7(2),* 136-149.

Rahmawati, Y., Budiwibowo, S., & Murwani, J. (2017). Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial PT. KAI PERSERO DAOP VII Madiun. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi, 5(1).*

Salman, K. R., & Farid, M. (2017). *Akuntansi Manajemen: Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan.* Indeks Permata Media.

Sianipar, R. T., Siregar, R. T., H. P., & Palungan, K. P. (2020). Dampak penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen, 6(1),* 87-95.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Alfabeta.

Sumadiyah. (2004). Job relevant information dan ketidakpastian lingkungan dalam hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. *Simposium Nasional Akuntansi VII.* Denpasar.

Rizky, Fahreza "Serapan Anggaran Minim Mendagri Minta Pemkab Indramayu Genjot Belanja," IDX Chanel, 28 Juli 2021. https://www.idxchannel.com/economics/serapan-anggaran- minim-mendagri-minta-pemkab-indramayu-genjot-belanja Diakses 24 Oktober 2021.